



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1355, 2020

KEMENKEU. Orta. Instansi Vertikal. Ditjen Bea dan Cukai. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 183/PMK.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI  
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan perubahan

organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1171/M.KT.01/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
- (2) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- (3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan

penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

- (4) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- (6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (7) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik,

pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

2. Pasal 138 dihapus.
3. Pasal 139 dihapus.
4. Pasal 140 dihapus.
5. Pasal 141 dihapus.
6. Pasal 142 dihapus.
7. Pasal 143 dihapus.
8. Pasal 144 dihapus.
9. Pasal 145 dihapus.
10. Pasal 146 dihapus.
11. Pasal 147 dihapus.
12. Pasal 148 dihapus.
13. Pasal 149 dihapus.
14. Pasal 150 dihapus.
15. Pasal 151 dihapus.
16. Pasal 152 dihapus.
17. Pasal 153 dihapus.

18. Pasal 154 dihapus.
19. Pasal 155 dihapus.
20. Pasal 156 dihapus.
21. Pasal 157 dihapus.
22. Pasal 158 dihapus.
23. Pasal 159 dihapus.
24. Pasal 160 dihapus.
25. Pasal 161 dihapus.
26. Pasal 162 dihapus.
27. Pasal 163 dihapus.
28. Pasal 164 dihapus.
29. Pasal 165 dihapus.
30. Pasal 166 dihapus.
31. Pasal 167 dihapus.
32. Pasal 168 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan

Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

- (2) Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- (3) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- (4) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- (6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (7) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

34. Pasal 171 dihapus.
35. Pasal 172 dihapus.
36. Pasal 173 dihapus.
37. Pasal 174 dihapus.
38. Pasal 175 dihapus.
39. Pasal 176 dihapus.
40. Pasal 177 dihapus.
41. Pasal 178 dihapus.
42. Pasal 179 dihapus.
43. Pasal 180 dihapus.
44. Pasal 181 dihapus.
45. Pasal 182 dihapus.
46. Pasal 183 dihapus.
47. Pasal 184 dihapus.



48. Pasal 185 dihapus.
49. Pasal 186 dihapus.
50. Pasal 187 dihapus.
51. Pasal 188 dihapus.
52. Pasal 189 dihapus.
53. Pasal 190 dihapus.
54. Pasal 191 dihapus.
55. Pasal 192 dihapus.
56. Pasal 193 dihapus.
57. Pasal 194 dihapus.
58. Pasal 195 dihapus.
59. Pasal 196 dihapus.
60. Pasal 197 dihapus.
61. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
- (2) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

- (3) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
- (4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (6) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,

analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- (7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, dan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

62. Pasal 200 dihapus.

63. Pasal 201 dihapus.

64. Pasal 202 dihapus.

65. Pasal 203 dihapus.

66. Pasal 204 dihapus.

67. Pasal 205 dihapus.

68. Pasal 206 dihapus.

69. Pasal 207 dihapus.

70. Pasal 208 dihapus.

71. Pasal 209 dihapus.

72. Pasal 210 dihapus.

73. Pasal 211 dihapus.

74. Pasal 212 dihapus.
75. Pasal 213 dihapus.
76. Pasal 214 dihapus.
77. Pasal 215 dihapus.
78. Pasal 216 dihapus.
79. Pasal 217 dihapus.
80. Pasal 218 dihapus.
81. Pasal 219 dihapus.
82. Pasal 220 dihapus.
83. Pasal 221 dihapus.
84. Pasal 222 dihapus.
85. Pasal 223 dihapus.
86. Pasal 224 dihapus.
87. Pasal 225 dihapus.
88. Pasal 226 dihapus.
89. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan

Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

- (2) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- (3) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
- (4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (6) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- (7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

90. Pasal 229 dihapus.

91. Pasal 230 dihapus.

92. Pasal 231 dihapus.

93. Pasal 232 dihapus.

94. Pasal 233 dihapus.

95. Pasal 234 dihapus.

96. Pasal 235 dihapus.

97. Pasal 236 dihapus.

98. Pasal 237 dihapus.

99. Pasal 238 dihapus.

100. Pasal 239 dihapus.

101. Pasal 240 dihapus.

102. Pasal 241 dihapus.

103. Pasal 242 dihapus.

104. Pasal 243 dihapus.

105. Pasal 244 dihapus.

106. Pasal 245 dihapus.

107. Pasal 246 dihapus.

108. Pasal 247 dihapus.

109. Pasal 248 dihapus.

110. Pasal 249 dihapus.

111. Pasal 250 dihapus.

112. Pasal 251 dihapus.

113. Pasal 252 dihapus.

114. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

- (2) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- (3) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
- (4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.



- (5) Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

115. Pasal 255 dihapus.

116. Pasal 256 dihapus.

117. Pasal 257 dihapus.

118. Pasal 258 dihapus.

119. Pasal 259 dihapus.

120. Pasal 260 dihapus.

121. Pasal 261 dihapus.

122. Pasal 262 dihapus.

123. Pasal 263 dihapus.

124. Pasal 264 dihapus.

125. Pasal 265 dihapus.

126. Pasal 266 dihapus.

127. Pasal 267 dihapus.

128. Pasal 268 dihapus.

129. Pasal 269 dihapus.

130. Pasal 270 dihapus.

131. Pasal 271 dihapus.

132. Pasal 272 dihapus.

133. Pasal 273 dihapus.

134. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 286 diubah dan ayat (8) Pasal 286 dihapus sehingga Pasal 286 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 286

- (1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (4) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (8) Dihapus.

135. Ketentuan ayat (1) Pasal 290 diubah sehingga Pasal 290 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 127, Pasal 130, Pasal 137 ayat (7), Pasal 170 ayat (7), Pasal 199 ayat (6), Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 254 ayat (5), berhak meminta dan memperoleh data dan

informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.

- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

136. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 293

- (1) Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan.

137. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

138. Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

139. Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  - b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - c. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

2. Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif maka organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah dilakukan sebelum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe
1.	Kantor Wilayah DJBC Aceh	Banda Aceh	Aceh	1.	KPPBC Sabang	Madya Pabean C
				2.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Meulaboh	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Lhokseumawe	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Langsa	Madya Pabean C
2.	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Medan	Sumatera Utara	1.	KPPBC Belawan	Madya Pabean
				2.	KPPBC Medan	Madya Pabean B



No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			Tipe
			Provinsi	No	Nama KPPBC	
3.	Kantor Wilayah DJBC Riau	Pekanbaru	Riau	3.	KPPBC Pematangsiantar	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Sibolga	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Teluk Nibung	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Kuala Tanjung	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Kualanamu	Madya Pabean B
				1.	KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Dumai	Madya Pabean B
4.	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau kecuali Kota Batam	3.	KPPBC Tembilahan	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Bengkalis	Madya Pabean C
				1.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Tanjungpinang	Madya Pabean B
5.	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur	Palembang	- Sumatera Selatan - Jambi - Bangka-Belitung	1.	KPPBC Palembang	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Jambi	Madya Pabean B
				3.	KPPBC Pangkalpinang	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Tanjungpandan	Madya Pabean C
6.	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat	Bandar Lampung	- Sumatera Barat - Bengkulu	1.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Bengkulu	Madya Pabean C

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe
7.	Kantor Wilayah DJBC Banten	Serang	- Lampung Banten kecuali Kawasan Bandara Soekarno-Hatta	3.	KPPBC Bandar Lampung	Madya Pabean B
				1.	KPPBC Merak	Madya Pabean
				2.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A
8.	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok	1.	KPPBC Jakarta	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Marunda	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Madya Pabean C
9.	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat	1.	KPPBC Bekasi	Madya Pabean A
				2.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Purwakarta	Madya Pabean A
				4.	KPPBC Bandung	Madya Pabean A
				5.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Tasikmalaya	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Cikarang	Madya Pabean
10.	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Semarang	- Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta	1.	KPPBC Tanjung Emas	Madya Pabean
				2.	KPPBC Kudus	Madya Cukai
				3.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B
				4.	KPPBC Cilacap	Madya Pabean C

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe
11.	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	Sidoarjo	Jawa Timur	5.	KPPBC Purwokerto	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Tegal	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A
				8.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B
				9.	KPPBC Magelang	Madya Pabean C
				1.	KPPBC Tanjung Perak	Madya Pabean
				2.	KPPBC Pasuruan	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Juanda	Madya Pabean
				4.	KPPBC Gresik	Madya Pabean B
12.	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	Malang	Jawa Timur	5.	KPPBC Madura	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Bojonegoro	Madya Pabean C
				7.	KPPBC Sidoarjo	Madya Pabean B
				1.	KPPBC Malang	Madya Cukai
				2.	KPPBC Kediri	Madya Cukai
				3.	KPPBC Blitar	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Madiun	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Jember	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Banyuwangi	Madya Pabean C

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe
13.	Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	Denpasar	- Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur	7.	KPPBC Probolinggo	Madya Pabean C
				1.	KPPBC Ngurah Rai	Madya Pabean
				2.	KPPBC Denpasar	Madya Pabean A
				3.	KPPBC Mataram	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Sumbawa	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Kupang	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Atambua	Madya Pabean B
14.	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	Pontianak	Kalimantan Barat	1.	KPPBC Pontianak	Madya Pabean B
				2.	KPPBC Entikong	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Nanga Badau	Madya Pabean C
				4.	KPPBC Sintete	Madya Pabean C
				5.	KPPBC Ketapang	Madya Pabean C
				6.	KPPBC Jagoi Babang	Madya Pabean C
				15.	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Banjarmasin
2.	KPPBC Sampit	Madya Pabean C				
3.	KPPBC Pangkajenean Bun	Madya Pabean C				
4.	KPPBC Palangkaraya	Madya Pabean C				

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe				
16.	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	Balikpapan	- Kalimantan Timur - Kalimantan Utara	5.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C				
				1.	KPPBC Balikpapan	Madya Pabean B				
				2.	KPPBC Samarinda	Madya Pabean B				
				3.	KPPBC Bontang	Madya Pabean C				
				4.	KPPBC Sangatta	Madya Pabean C				
				5.	KPPBC Tarakan	Madya Pabean B				
17.	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Makassar	- Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat - Sulawesi Tenggara	1.	KPPBC Makassar	Madya Pabean B				
				2.	KPPBC Parepare	Madya Pabean C				
				3.	KPPBC Malili	Madya Pabean C				
				4.	KPPBC Kendari	Madya Pabean C				
				18.	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara	Manado	- Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah - Gorontalo	1.	KPPBC Pantoloan	Madya Pabean C
								2.	KPPBC Morowali	Madya Pabean C
3.	KPPBC Luwuk	Madya Pabean C								
4.	KPPBC Bitung	Madya Pabean C								
5.	KPPBC Manado	Madya Pabean C								
6.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C								

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			Type
			Provinsi	No	Nama KPPBC	
19.	Kantor Wilayah DJBC Maluku	Ambon	- Maluku	1.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C
			- Maluku Utara	2.	KPPBC Tual	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C
20.	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	Sorong	- Papua Barat	1.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C
			- Papua	2.	KPPBC Manokwari	Madya Pabean C
			3.	KPPBC Fakfak	Madya Pabean C	
			4.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	
			5.	KPPBC Timika	Madya Pabean C	
			6.	KPPBC Biak	Madya Pabean C	
			7.	KPPBC Merauke	Madya Pabean C	
20 KANWIL				104 KPPBC		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



 SRI MULYANI INDRAMATI

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			Tipe
			Provinsi	No	Nama KPPBC	
19.	Kantor Wilayah DJBC Maluku	Ambon	- Maluku	1.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C
			- Maluku Utara	2.	KPPBC Tual	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C
20.	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	Sorong	- Papua Barat	1.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C
			- Papua	2.	KPPBC Manokwari	Madya Pabean C
			3.	KPPBC Fakfak	Madya Pabean C	
			4.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	
			5.	KPPBC Timika	Madya Pabean C	
			6.	KPPBC Biak	Madya Pabean C	
			7.	KPPBC Merauke	Madya Pabean C	
20 KANWIL				104 KPPBC		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMAWATI

No	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja			
			Provinsi	No	Nama KPPBC	Tipe
19.	Kantor Wilayah DJBC Maluku	Ambon	- Maluku	1.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C
			- Maluku Utara	2.	KPPBC Tual	Madya Pabean C
				3.	KPPBC Ternate	Madya Pabean C
20.	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	Sorong	- Papua Barat	1.	KPPBC Sorong	Madya Pabean C
			- Papua	2.	KPPBC Manokwari	Madya Pabean C
			3.	KPPBC Fakfak	Madya Pabean C	
			4.	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	
			5.	KPPBC Timika	Madya Pabean C	
			6.	KPPBC Biak	Madya Pabean C	
			7.	KPPBC Merauke	Madya Pabean C	
20 KANWIL				104 KPPBC		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



† SRI MULYANI INDRAMATI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN,  
 KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
1.	KPU Tanjung Priok	A	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok			1. TPS PT Agung Raya 2. TPS PT Indonesia Air & Marine Supply (Jalan Cilincing Raya)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
							3. TPS PT Indonesia Air & Marine Supply (Eks Lapangan Sepakbola PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari) 4. TPS PT Graha Segara 5. TPS PT Indofood Sukses Makmur Tbk 6. TPS PT JICT 7. TPS KSO Terminal Petikemas Koja 8. TPS PT Lautan Tirta Transportama

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						9. TPS PT Multi Terminal Indonesia (CDC Banda) 10. TPS PT Multi Terminal Indonesia (Halal Hub) 11. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ambon) 12. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (101- 101U) 13. TPS PT Mustika Alam Lestari 14. TPS PT IPC Terminal Petikemas (Terminal 3)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
						15. TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 221X)	
						16. TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 223X)	
						17. TPS PT Indonesia Kendaraan Terminal	
						18. TPS PT Primanata Jasa Persada	
						19. TPS PT Transporindo Lima Perkasa	
						20. TPS PT Wira Mitra Prima	
						21. TPS PT Dharma Kartika Bhakti	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						22. TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/NPCT I 23. TPS PT Pesaka Loka Kirana 24. TPS PT Berdikari (Persero) 25. TPS PT Buana Amanah Karya 26. TPS PT Dharma Karya Perdana 27. TPP PT Transcon Indonesia 28. TPP PT Tri Pandu Pelita

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
2.	KPU Batam	B	Batam	Kota Batam			29. TPP PT Layanan Lancar Lintas Logistindo 30. TPP PT Multi Sejahtera Abadi 31. TPP Cikarang 32. Pelabuhan Nusantara 33. Perairan Dalam dan Luar Dam Tanjung Priok  1. Pulau Buluh (PL) 2. Tanjung Riau (PL) 3. Tanjung Uncang (PL) 4. Tanjung Piayu (PL) 5. Batu Besar Pantai (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Type	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Harbor Bay (PL) 6. Kantor Pos Laju Bea Batam 7. Sambu Belakang Padang	6. Sei Jodoh (PL) 7. Momo (PL) 8. Tanjung Sauh (PL) 9. Pulau Ngenang (PL) 10. Pulau Janda Berhias (PL) 11. Tanjung Kasam (PL) 12. Nongsa (PL) 13. Sagulung (PL) 14. Macobar (PL) 15. Kabil (PL) 16. Pulau Galang Baru 17. Pulau Bulan 18. Tanjung Buntung 19. Pulau Rempang 20. Batam Kota 21. Pulau Layang (PL)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
3.	KPU Soekarno- Hatta	C	Kota Tangerang	Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno- Hatta		22. Pulau Peiampung 23. Sambu Belakang Padang (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC ACEH					1. Terminal 1 2. Terminal 2 3. Terminal 3 Ultimate 4. Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta 5. PT Taman Niaga Soewarna



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
4.	KPPBC Sabang	Madya Pabean C	Kota Sabang	1. Kota Sabang 2. Kabupaten Aceh Besar pada Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya		1. Maimun Saleh (PU) 2. Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (PL) 3. Balohan (PL) 4. Lempuyangan Pulau Nasi (PL)
5.	KPPBC Banda Aceh	Madya Pabean C	Kota Banda Aceh	1. Kota Banda Aceh 2. Kabupaten Aceh Besar kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil di sekitarnya 3. Kabupaten Pidie 4. Kabupaten Pidie Jaya	Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh	1. Lampulo (PL) 2. Sigli (PL) 3. Malahayati (PL) 4. Sultan Iskandar Muda (PU) 5. Ulee Lheue (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
6.	KPPBC Meulaboh	Madya Pabean C	Kabupaten Aceh Barat	1. Kabupaten Aceh Barat 2. Kabupaten Aceh Jaya 3. Kabupaten Nagan Raya 4. Kabupaten Aceh Barat Daya 5. Kabupaten Aceh Selatan 6. Kota Subulussalam 7. Kabupaten Aceh Singkil 8. Kabupaten Simeulue	Sinabang (PL)	1. Susoh (PL) 2. Meulaboh (PL) 3. Tapak Tuan (PL) 4. Labuhan Haji (PL) 5. Singkil
7.	KPPBC Lhokseumawe	Madya Pabean C	Kota Lhokseumawe	1. Kota Lhokseumawe 2. Kabupaten Bireuen 3. Kabupaten Aceh Utara 4. Kabupaten Bener Meriah 5. Kabupaten Aceh Tengah		1. Blang Lancang (PL) 2. Krueng Geukueh (PL) 3. Lhoksukon (PL) 4. Peudada (PL) 5. Jambu Aye (PL)
8.	KPPBC Langsa	Madya Pabean C	Kota Langsa	1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Timur 3. Kabupaten Aceh Tamiang		1. Kuala Langsa (PL) 2. Kuala Idi (PL) 3. Matang Nibong (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				4. Kabupaten Gayo Lues 5. Kabupaten Aceh Tenggara		4. Seruway (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA					
9.	KPPBC Belawan	Madya Pabean	Kota Medan	1. Kota Medan pada Kawasan Pelabuhan Laut Belawan 2. Kawasan perairan Kabupaten Deli Serdang 3. Kabupaten Serdang Bedagai pada Pelabuhan Pantai Cermin		1. Percut Sei Tuan (PL) 2. Pantai Cermin (PL) 3. Pantai Labu (PL) 4. Ujung Baru (PL) 5. Gudang Merah (PL) 6. Gabion (PL) 7. Rantau Panjang (PL)
10.	KPPBC Medan	Madya Pabean B	Kota Medan	1. Kota Medan kecuali Kawasan Pelabuhan Belawan	1. Kantor Pos Lalu Bea Medan 2. Pangkalan Susu	1. Polonia (PU) 2. Lubuk Pakam 3. Tanjung Morawa

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
11.	KPPBC Pematangsiantar	Madya Pabean C	Kota Pematangsiantar	2. Kabupaten Deli Serdang kecuali Kawasan Bandara Kualanamu dan wilayah perairan 3. Kota Binjai 4. Kabupaten Langkat	3. Pangkalan Brandan (PL)	4. Binjai 5. Tanjung Pura (PL) 6. Pangkalan Susu (PL)
12.	KPPBC Sibolga	Madya Pabean C	Kota Sibolga	1. Kota Pematangsiantar 2. Kabupaten Simalungun 3. Kabupaten Toba Samosir 4. Kabupaten Samosir 5. Kabupaten Pakpak Bharat 6. Kabupaten Dairi 7. Kabupaten Karo	Kantor Pos Lalu Bea Pematangsiantar	1. Porsea 2. Kabanjahe 3. Sidikalang
				1. Kota Sibolga 2. Kabupaten Tapanuli Tengah	1. Gunungsitoli (PL) 2. Silangit (PU)	1. Barus (PL) 2. Natal (PL) 3. Teluk Dalam (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				3. Kabupaten Humbang Hasundutan 4. Kabupaten Tapanuli Utara 5. Kabupaten Tapanuli Sielatan 6. Kota Padangsidempuan 7. Kabupaten Padang Lawas 8. Kabupaten Padang Lawas Utara 9. Kabupaten Mandailing Natal 10. Kabupaten Nias Selatan 11. Kabupaten Nias 12. Kota Gunungsitoli 13. Kabupaten Nias Barat 14. Kabupaten Nias Utara		4. Pulau Tello (PL) 5. Sibolga (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
13.	KPPBC Teluk Nibung	Madya Pabean C	Kota Tanjungbalai	1. Kota Tanjungbalai 2. Kabupaten Asahan 3. Kabupaten Labuhanbatu Utara 4. Kabupaten Labuhanbatu 5. Kabupaten Labuhanbatu Selatan		1. Tanjung Leidong (PL) 2. Labuhan Bilik (PL) 3. Bagan Asahan (PL) 4. Sungai Berombang (PL)
14.	KPPBC Kuala Tanjung	Madya Pabean C	Kabupaten Batu Bara	1. Kabupaten Batu Bara 2. Kota Tebing Tinggi 3. Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Pelabuhan Pantai Cermin	Tebing Tinggi	1. Tanjung Tiram (PL) 2. Bandar Khalifah (PL) 3. Teluk Mengkudu (PL) 4. Tanjung Beringin (PL) 5. Pangkalan Dodek (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
15.	KPPBC Kualanamu	Madya Pabean B	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kualanamu, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa	Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa	Kualanamu (PU)
	KANTOR WILAYAH DJBC RIAU					
16.	KPPBC Pekanbaru	Madya Pabean B	Kota Pekanbaru	1. Kota Pekanbaru 2. Kabupaten Siak 3. Kabupaten Rokan Hulu 4. Kabupaten Kampar	1. Perawang (PL) 2. Rumbai (PL) 3. Rantau Panjang 4. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru	1. Sultan Syarif Kasim II (PU) 2. Buatan (PL) 3. Pekanbaru (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Pelalawan kecuai Pos Pengawasan Serapung dan Pos Pengawasan Penyalai	5. Siak Sri Indrapura	4. Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu 5. Sungai Apit (PL) 6. Tanjung Buton (PL) 7. Siak Sri Indrapura (PL)
17.	KPPBC Dumai	Madya Pabean B	Kota Dumai	1. Kota Dumai 2. Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan Mandau, Kantor Bantu Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupat Utara, Pos Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bukit Batu 3. Kabupaten Rokan Hilir	1. Tanjung Medang (PL) 2. Bagansiapiapi 3. Panipahan	1. Selat Morong (PL) 2. Tanah Putih (PL) 3. Dumai (PL) 4. Tanjung Medang (PL) 5. Sinaboi (PL) 6. Tanjung Lumba- Lumba (PL) 7. Pulau Halang (PL) 8. Bagansiapiapi (PL)



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
18.	KPPBC Tembilahan	Madya Pabean C	Kabupaten Indragiri Hilir	1. Kabupaten Indragiri Hilir 2. Kabupaten Indragiri Hulu 3. Kabupaten Kuantan Singingi	1. Sungai Guntung (PL) 2. Rengat 3. Kuala Enok	1. Perigi Raja (PL) 2. Concong Luar (PL) 3. Sei Buluh, Indragiri (PL) 4. Pulau Kijang (PL) 5. Kuala Gaung (PL) 6. Kuala Belaras (PL) 7. Kuala Enok (PL) 8. Kuala Cenaku (PL) 9. Japura (PU) 10. Pulau Cawan (PL) 11. Kuala Bayas (PL) 12. Pulau Burung (PL) 13. Tembilahan (PL)
19.	KPPBC Bengkalis	Madya Pabean C	Kabupaten Bengkalis	1. Kabupaten Bengkalis kecuali Kecamatan Mandau, Kantor Bantu	1. Sungai Pakning (PL)	1. Siak Kecil (PL) 2. Sei Kembang (PL) 3. Bantul (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				<p>Tanjung Medang (PL) Kecamatan Rupa Utara, Pos Pengawasan Selat Morong (PL) Kecamatan Rupa dan Kecamatan Bukit Batu</p> <p>2. Kabupaten Kepulauan Meranti</p> <p>3. Kabupaten Pelalawan pada Pos Pengawasan Serapung dan Pos Pengawasan Penyalai</p>	<p>2. Bantan Tengah (PL)</p> <p>3. Selatpanjang</p>	<p>4. Bukit Batu (PL)</p> <p>5. Prapat Tunggai (PL)</p> <p>6. Bengkalis (PL)</p> <p>7. Tanjung Samak (PL)</p> <p>8. Teluk Belitang (PL)</p> <p>9. Terus (PL)</p> <p>10. Tanjung Kedabu (PL)</p> <p>11. Selatpanjang (PL)</p> <p>12. Penyalai (PL)</p> <p>13. Tanjung Motong (PL)</p> <p>14. Serapung (PL)</p>
	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
	KEPULAUAN RIAU						
20.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	Madya Pabean B	Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun	1. Moro Sulit (PL) 2. Tanjung Batu (PL) 3. Parit Rampak (PL)	1. Sawang (PL) 2. Urung (PL) 3. Pulau Buru 4. Leho 5. Kolong 6. Tanjung Balai Karimun (PL) 7. Pasir Panjang (PL)	
21.	KPPBC Tanjungpinang	Madya Pabean B	Kota Tanjungpinang	1. Kota Tanjungpinang 2. Kabupaten Bintan 3. Kabupaten Lingga 4. Kabupaten Kepulauan Anambas 5. Kabupaten Natuna	1. Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpinang 2. Dabo Singkep 3. Tarempa 4. Ranai	1. Tanjungpinang (PL) 2. Kijang (PL) 3. Kijang (PU) 4. Tanjung Uban (PL) 5. Lagoi (PL) 6. Lobam (PL) 7. Penuba (PL)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						8. Sungai Buhuh (PL) 9. Senayang (PL) 10. Daik (PL) 11. Dabo (PU) 12. Dabo Singkep (PL) 13. Pulau Cempa 14. Pulau Tajur Biru 15. Uidang Natuna 16. Matak 17. Serasan 18. Midai 19. Tambelan 20. Jemaja 21. Bunguran Barat 22. Bunguran Timur

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
22.	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR Palembang	Madya Pabean B	Kota Palembang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan	1. Tanjung Buyut (PL) 2. Pusri (PL) 3. S.M. Badarudin II (PU) 4. Kantor Pos Lalu Bea Palembang	1. Muara Enim 2. Sekayu 3. Lubuklinggau 4. Baturaja 5. Kertapati	
23.	KPPBC Jambi	Madya Pabean B	Kota Jambi	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi	1. Kuala Tungkal (PL) 2. Muara Sabak (PL) 3. Kantor Pos Lalu Bea Jambi	1. Kuala Mendahara (PL) 2. Nipah Panjang (PL) 3. Sultan Thaha (PU) 4. Suak Kandis (PL)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
24.	KPPBC Pangkalpinang	Madya Pabean C	Kota Pangkalpinang	1. Kota Pangkalpinang 2. Kabupaten Bangka 3. Kabupaten Bangka Tengah 4. Kabupaten Bangka Selatan 5. Kabupaten Bangka Barat	1. Muntok 2. Kantor Pos Lalu Bea Pangkalpinang	1. Belinyu (PL) 2. Toboali (PL) 3. Depati Amir (PU)
25.	KPPBC Tanjungpandan	Madya Pabean C	Kabupaten Belitung	1. Kabupaten Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur	1. Manggar (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpandan 3. Tanjungbatu (PL)	H.A.S. Hanandjoeddin (PU)
	KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
26.	KPPBC Teluk Bayur	Madya Pabean B	Kota Padang	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat	1. Sikakap (PL) 2. Tua Pejat (PL) 3. Minangkabau (PU) 4. Kantor Pos Lelu Bea Padang	1. Muara Padang (PL) 2. Siberut Mentawai 3. Pariaman (PL) 4. Painan (PL) 5. Muara (PL) 6. Cubadak (PL) 7. Teluk Bayur (PL) 8. Tabing (PU) 9. Air Bangis (PL) 10. Bungus (PL)
27.	KPPBC Bengkulu	Madya Pabean C	Kota Bengkulu	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bengkulu	Kantor Pos Lelu Bea Bengkulu	1. Linau (PL) 2. Mukomuko (PL) 3. Pulau Enggano (PL) 4. Fatmawati Soekarno (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
28.	KPPBC Bandar Lampung	Madya Pabean B	Kota Bandar Lampung	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung	1. Kota Agung 2. Raden Inten II (PU) 3. Kantor Pos Lalu Bea Bandar Lampung	1. Bakauehi (PL) 2. Seputih Mataram 3. Panjang (PL) 4. Labuhan Meringgai (PL) 5. Krui (PL) 6. Kalianda (PL)
29.	KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN	Madya Pabean	Kota Cilegon	1. Kota Cilegon 2. Kota Serang 3. Kabupaten Serang 4. Kabupaten Pandeglang 5. Kabupaten Lebak		1. Chandra Asri 2. Merak (PL) 3. Cigading (PL) 4. Tanjung Leneng (PL) 5. Ciwandan (PL) 6. Bayah (PL)



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
30.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A	Kota Tangerang Selatan	1. Kota Tangerang Selatan 2. Kota Tangerang 3. Kabupaten Tangerang		Tangerang
	KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA					
31.	KPPBC Jakarta	Madya Pabean A	Kota Jakarta Timur	1. Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kota Administrasi Jakarta Selatan		Halim Perdana Kusuma (PU)
32.	KPPBC Marunda	Madya Pabean A	Kota Jakarta Utara	1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kota Administrasi Jakarta Barat		1. Sunda Kelapa (PL) 2. Marina Ancol 3. Muara Baru (PL) 4. Widuri (PL) 5. Arjuna (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				3. Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok 4. Kabupaten Bekasi pada Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center		6. Cinta Natomas 7. Cilincing 8. Marunda
33.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	Madya Pabean C	Kota Jakarta Pusat	Barang kiriman pos asal luar daerah pabean dan pengiriman ke luar daerah pabean melalui <i>Mail Processing Center</i> (MPC) Jakarta 10900 PT Pos Indonesia		

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
34.	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT					
	KPPBC Bekasi	Madya Pabean A	Kabupaten Bekasi	1. Kota Bekasi 2. Kabupaten Bekasi pada sebelah selatan Jalan Tol Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung		
35.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A	Kota Bogor	1. Kota Bogor 2. Kabupaten Bogor 3. Kota Sukabumi 4. Kabupaten Sukabumi 5. Kota Depok 6. Kabupaten Cianjur	Sukabumi	Pelabuhan Ratu (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
36.	KPPBC Purwakarta	Madya Pabean A	Kabupaten Purwakarta	1. Kabupaten Purwakarta 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Karawang	Patimban (PL)	1. Purwakarta 2. Subang 3. Cilamaya (PL) 4. Kawasan Industri Kota Bukit Indah
37.	KPPBC Bandung	Madya Pabean A	Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Bandung 3. Kota Cimahi 4. Kabupaten Bandung Barat 5. Kabupaten Sumedang	Kantor Pos Lalu Bea Bandung	1. Sumedang 2. Gedebage 3. Husein Sastranegara (PU) 4. Soreang
38.	KPPBC Cirebon	Madya Pabean C	Kota Cirebon	1. Kota Cirebon 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Majalengka 4. Kabupaten Kuningan 5. Kabupaten Indramayu	1. Balongan 2. Kantor Pos Lalu Bea Cirebon 3. Kertajati (PU)	1. Palimanan 2. Cirebon (PL) 3. Losari 4. Majalengka 5. Kuningan 6. Indramayu

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
39.	KPPBC Tasikmalaya	Madya Pabean C	Kota Tasikmalaya	1. Kota Tasikmalaya 2. Kabupaten Tasik 3. Kabupaten Garut 4. Kabupaten Ciamis 5. Kota Banjar 6. Kabupaten Pangandaran	Kantor Pos Lalu Bea Tasikmalaya	Pangandaran
40.	KPPBC Cikarang	Madya Pabean	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi pada sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center		
	KANTOR WILAYAH DJBC					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
41.	KPPBC Tanjung Emas	Madya Pabean	Kota Semarang	Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang	1. Ahmad Yani (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Semarang (PL)	1. Tanjung Emas I (PL) 2. Tanjung Emas II (PL) 3. Tanjung Emas III (PL)
42.	KPPBC Kudus	Madya Cukai	Kabupaten Kudus	1. Kabupaten Kudus 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Rembang 4. Kabupaten Blora 5. Kabupaten Jepara	1. Juwono (PL) 2. Jepara (PL)	1. Banyutowo 2. Rembang 3. Cepu 4. Blora 5. Karimunjawa (PL)
43.	KPPBC Surakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Karanganyar	1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Boyolali 3. Kabupaten Klaten	1. Adi Sumarmo (PU)	1. Kebakkramat 2. Klaten 3. Karanganyar

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				4. Kabupaten Sukoharjo 5. Kabupaten Karanganyar 6. Kabupaten Sragen 7. Kabupaten Wonogiri	2. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta	4. Sragen 5. Sukoharjo 6. Wonogiri 7. Boyolali 8. Jebres
44.	KPPBC Cilacap	Madya Pabean C	Kabupaten Cilacap	1. Kabupaten Cilacap 2. Kabupaten Kebumen	Kebumen	1. Tunggul Wulung (PU) 2. Tanjung Intan (PL)
45.	KPPBC Purwokerto	Madya Pabean C	Kabupaten Banyumas	1. Kabupaten Banyumas 2. Kabupaten Purbalingga 3. Kabupaten Banjarnegara		1. Purbalingga 2. Banjarnegara
46.	KPPBC Tegal	Madya Pabean C	Kota Tegal	1. Kota Tegal 2. Kabupaten Tegal 3. Kabupaten Pemalang 4. Kabupaten Brebes 5. Kota Pekalongan 6. Kabupaten Pekalongan	1. Pekalongan 2. Batang (PL)	1. Brebes 2. Tegal (PL) 3. Pemalang 4. Pekalongan (PL) 5. Jamban (PL) 6. Wonokerto (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
47.	KPPBC Semarang	Madya Pabean A	Kota Semarang	7. Kabupaten Batang 1. Kota Semarang kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang 2. Kabupaten Demak 3. Kabupaten Grobogan 4. Kabupaten Kendal 5. Kabupaten Semarang 6. Kota Salatiga	7. Celong Batang (PL) 1. Kawasan Industri Wijayakusuma 2. Demak 3. Purwodadi 4. Salatiga 5. Kaliwungu	
48.	KPPBC Yogyakarta	Madya Pabean B	Kabupaten Sleman	1. Kabupaten Sleman 2. Kota Yogyakarta 3. Kabupaten Kulonprogo 4. Kabupaten Bantul 5. Kabupaten Gunung Kidul	1. Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta 2. Yogyakarta <i>International</i> <i>Airport (PU)</i>	1. Sleman 2. Wates 3. Bantul 4. Wonosari 5. Adi Sucipto (PU)



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
49.	KPPBC Magelang	Madya Pabean C	Kota Magelang	1. Kota Magelang 2. Kabupaten Magelang 3. Kabupaten Purworejo 4. Kabupaten Temanggung 5. Kabupaten Wonosobo		1. Temanggung 2. Purworejo 3. Wonosobo
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I					
50.	KPPBC Tanjung Perak	Madya Pabean	Kota Surabaya	Kota Surabaya meliputi kegiatan kepabeanan pada Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo		1. ICT I (PL) 2. ICT II (PL) 3. ICT III (PL) 4. ICT IV (PL) 5. Nilam I (PL) 6. Nilam II (PL) 7. Berlian I (PL) 8. Berlian II (PL) 9. Mirah I (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
51.	KPPBC Pasuruan	Madya Pabean A	Kabupaten Pasuruan	1. Kota Pasuruan 2. Kabupaten Pasuruan		10. Mirah II (PL) 11. Jamrud I (PL) 12. Jamrud II (PL) 13. Kalimas 14. Bogasari (PL) 15. Dermaga Ujung (PL) 16. Teluk Lamong (PL)  1. Pasuruan (PL) 2. Lekok (PL) 3. Kawasan Industri PIER 4. Purwosari
52.	KPPBC Juanda	Madya Pabean	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Laju Bea	1. Kantor Tukar Pos Udara Juanda 2. Kantor Pos Laju Bea Surabaya	1. Terminal I 2. Terminal II 3. Kargo

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
53.	KPPBC Gresik	Madya Pabean B	Kabupaten Gresik	1. Kabupaten Gresik 2. Kabupaten Lamongan		1. Tambak (PL) 2. Sedayulawas (PL) 3. Lamongan 4. Gresik (PL) 5. Blok Poleng 6. Ngimboh (PL) 7. Sangkapura (PL) 8. Dermaga Khusus Petrokimia 9. Dermaga Khusus PLTGU 10. Dermaga Khusus Semen Gresik 11. Dermaga Khusus Maspion 12. Dermaga Khusus Smelting Co.

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						13. Dermaga Khusus Wilmar 14. Dermaga Khusus Pertamina 15. Dermaga Khusus PT Sumber Mas 16. Lamongan Shorebase 17. Pelabuhan Kalimiring (JIPE) 18. Blok Camar
54.	KPPBC Madura	Madya Pabean C	Kabupaten Sumenep	1. Kabupaten Sumenep 2. Kabupaten Pamekasan 3. Kabupaten Sampang 4. Kabupaten Bangkalan		1. Pascan (PL) 2. Sampang 3. Dongkek (PL) 4. Sapudi (PL) 5. Kangean (PL) 6. Branta (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						7. Trunojoyo (PU) 8. Kaliaset (PL) 9. Telaga Biru (PL) 10. Pagerungan (PL) 11. Kamal (PL) 12. Bangkalan (PL) 13. Sepuhu (PL)
55.	KPPBC Bojonegoro	Madya Pabean C	Bojonegoro	1. Kabupaten Bojonegoro 2. Kabupaten Tuban		1. Glondong 2. Socorejo-Jenu (PL) 3. Tuban (PL) 4. Kerek-Tambakboyo (PL) 5. Remen-Jenu (PL)
56.	KPPBC Sidoarjo	Madya Pabean B	Kabupaten Sidoarjo	1. Kabupaten Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat		

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Dacrah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea 2. Kota Mojokerto 3. Kabupaten Mojokerto 4. Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo 5. Kota Surabaya meliputi seluruh kegiatan cukai		

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II					
57.	KPPBC Malang	Madya Cukai	Kota Malang	1. Kota Malang 2. Kabupaten Malang 3. Kota Batu	Kantor Pos Lalu Bea Malang	
58.	KPPBC Kediri	Madya Cukai	Kota Kediri	1. Kota Kediri 2. Kabupaten Kediri 3. Kabupaten Nganjuk 4. Kabupaten Jombang	Kantor Pos Lalu Bea Kediri	1. Nganjuk 2. Kertosono 3. Cukir 4. Jombang
59.	KPPBC Blitar	Madya Pabean C	Kota Blitar	1. Kota Blitar 2. Kabupaten Blitar 3. Kabupaten Tulungagung 4. Kabupaten Trenggalek	Tulungagung	
60.	KPPBC Madiun	Madya Pabean C	Kota Madiun	1. Kota Madiun 2. Kabupaten Madiun 3. Kabupaten Ngawi		1. Magetan 2. Ngawi 3. Ponorogo

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
61.	KPPBC Jember	Madya Pabean C	Kabupaten Jember	4. Kabupaten Magetan 5. Kabupaten Ponorogo 6. Kabupaten Pacitan 1. Kabupaten Jember 2. Kabupaten Situbondo 3. Kabupaten Bondowoso	1. Panarukan 2. Kantor Pos Lalu Bea Jember	4. Caruban 5. Pacitan (PL) 1. Besuki (PL) 2. Jangkar (PL) 3. Rambipuji	
62.	KPPBC Banyuwangi	Madya Pabean C	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Pantai Boom Marina	1. Tanjung Wangi (PL) 2. Ketapang (PL) 3. Blimbingsari (PU)	
63.	KPPBC Probolinggo	Madya Pabean C	Kota Probolinggo	1. Kota Probolinggo 2. Kabupaten Probolinggo 3. Kabupaten Lumajang			
	KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN						



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
	NUSA TENGARA TIMUR					
64.	KPPBC Ngurah Rai	Madya Pabean	Kabupaten Badung	1. Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai 2. Kota Denpasar pada Kantor Pos Lalu Bea Denpasar	Kantor Pos Lalu Bea Denpasar	Ngurah Rai (PU)
65.	KPPBC Denpasar	Madya Pabean A	Kota Denpasar	Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bali kecuali Kawasan Bandara Ngurah Rai	1. Celukan Bawang 2. Benoa 3. Karang Asem	1. Bangli 2. Klungkung 3. Gianyar 4. Tabanan 5. Pintu Utama Padang Bai (PL) 6. Dermaga Padang Bai (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
66.	KPPBC Mataram	Madya Pabean C	Kota Mataram	1. Kota Mataram 2. Kabupaten Lombok Barat 3. Kabupaten Lombok Tengah 4. Kabupaten Lombok Utara	1. Kantor Pos Lalu Bea Mataram 2. Lombok (PU)	7. Pertamina Amuk (PL) 8. Nusa Penida (PL) 9. Dermaga Cargo I (PL) 10. Dermaga Cargo II (PL) 11. Dermaga Kapal Ikan (PL) 12. Dermaga Kapal Turis (PL) 13. Buleleng (PL) 14. Negara 15. Gilimanuk (PL) 1. Labuhan Haji (PL) 2. Labuhan Lombok (PL) 3. Selaparang (PU) 4. Lembar (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
67.	KPPBC Sumbawa	Madya Pabean C	Kabupaten Sumbawa	5. Kabupaten Lombok Timur  1. Kabupaten Sumbawa 2. Kabupaten Sumbawa Barat 3. Kabupaten Dompu 4. Kabupaten Bima 5. Kota Bima	1. Benete (PL) 2. Bima	5. Pemenang (PL)  1. Sape (PLF) 2. Labuhan Alas (PL) 3. Sultan Muhammad Kaharuddin (PU) 4. Sultan Muhammad Salahuddin (PU) 5. Pototano (PLF) 6. Kempo 7. Labuan Lalar (PL) 8. Calabai Dompu (PL) 9. Labuan Jambu Tarano 10. Labuan Buak 11. Bima (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
68.	KPPBC Kupang	Madya Pabean C	Kota Kupang	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Kupang 3. Kabupaten Timor Tengah Selatan 4. Kabupaten Rote Ndao 5. Kabupaten Sabu Raijua 6. Kabupaten Sumba Timur 7. Kabupaten Sumba Tengah 8. Kabupaten Sumba Barat 9. Kabupaten Sumba Barat Daya 10. Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Iiwaki di Pulau Wetar	1. Waingapu (PL) 2. Kantor Pos Lalu Bea Kupang	1. Tenau 2. Mau Hau (PU) 3. Tambolaka (PU) 4. Rua (PL) 5. Baa/Pulau Rote (PL) 6. Iiwaki/Wetar 7. Ei Tari (PU) 8. Oepoli

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
69.	KPPBC Atambua	Madya Pabean B	Kabupaten Belu	1. Kabupaten Belu 2. Kabupaten Timor Tengah Utara 3. Kabupaten Alor 4. Kabupaten Malaka	1. Motaain (LBD) 2. Metamauk (LBD) 3. Napan (LBD) 4. Wini (LBD) 5. Kalabahi 6. Atapupu	1. Haliwen (PU) 2. Turiskain 3. Mali (PU) 4. Laktutus 5. Builalu 6. Haumeniana
70.	KPPBC Labuan Bajo	Madya Pabean C	Kabupaten Manggarai Barat	1. Kabupaten Sikka 2. Kabupaten Ende 3. Kabupaten Nagekeo 4. Kabupaten Ngada 5. Kabupaten Manggarai Timur 6. Kabupaten Manggarai Barat 7. Kabupaten Manggarai Barat 8. Kabupaten Flores Timur	1. Kedindi Reo (PL) 2. Ende (PL dan Pos Lalu Bea) 3. Larantuka (PL) 4. Kantor Pos Lalu Bea Maumere 5. Maumere	1. Labuan Bajo dan Komodo (PL) 2. Satartacik (PU) 3. Gewayangtama (PU) 4. Wai Oti (PU) 5. H. Aroeboesman (PU) 6. Padha Maleda (PU) 7. Maumere (PL) 8. Ende Ipi (PL) 9. Labuan Bajo (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				9. Kabupaten Lembata		
	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT					
71.	KPPBC Pontianak	Madya Pabean B	Kota Pontianak	1. Kota Pontianak 2. Kabupaten Mempawah 3. Kabupaten Kubu Raya	1. Supadio (PU) 2. Kantor Pos Laju Bea Pontianak 3. Kijing (PL)	1. Jungkat (PL) 2. Pontianak (PL) 3. Sungai Kakap (PL) 4. Kubu (PL) 5. Teluk Air (PL) 6. Padang Tikar (PL)
72.	KPPBC Entikong	Madya Pabean C	Kabupaten Sanggau	1. Kabupaten Sanggau 2. Kabupaten Sekadau 3. Kabupaten Meiawi		1. Simpang Tiga Lubuk Sabuk 2. Bantan 3. Segumon

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
73.	KPPBC Nanga Badau	Madya Pabean C	Kabupaten Kapuas Hulu	1. Kabupaten Kapuas Hulu 2. Kabupaten Sintang		1. Marakai Panjang 2. Nanga Bayan 3. Jasa	
74.	KPPBC Sintete	Madya Pabean C	Kabupaten Sambas	1. Kabupaten Sambas 2. Kota Singkawang 3. Kabupaten Bengkayang pada Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado	1. Singkawang 2. Aruk 3. Paloh	1. Liku 2. Sajingan 3. Temajuk (PL) 4. Sintete (PL)	
75.	KPPBC Ketapang	Madya Pabean C	Kabupaten Ketapang	1. Kabupaten Ketapang 2. Kabupaten Kayong Utara	Kendawangan (PL)	1. Teluk Batang (PL) 2. Teluk Melano (PL) 3. Ketapang (PL) 4. Rahadi Usman (PU)	
76.	KPPBC Jagoi Babang	Madya Pabean C	Kabupaten Bengkayang	1. Kabupaten Bengkayang kecuali Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya		1. Sidding 2. Saparan	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Kepulauan dan Kecamatan Monterado 2. Kabupaten Landak		
	KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN					
77.	KPPBC Sampit	Madya Pabean C	Kabupaten Kotawaringin Timur	1. Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Kabupaten Seruyan 3. Kabupaten Katingan		1. Samudra (PL) 2. Kuala Pembuang (PL) 3. Pegatan Mendawai (PL) 4. H. Asan (PU) 5. Sampit (PL) 6. Bagendang (PL)



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
78.	KPPBC Pangkalan Bun	Madya Pabean C	Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kabupaten Sukamara 3. Kabupaten Lamandau	Kumai (PL)	1. Muara Sungai Arut (PL) 2. Kuala Jelai (PL) 3. Iskandar (PU) 4. Pangkalan Bun (PL)
79.	KPPBC Palangkaraya	Madya Pabean C	Kota Palangkaraya	1. Kabupaten Pulang Pisau 2. Kabupaten Kapuas 3. Kabupaten Barito Selatan 4. Kabupaten Barito Timur 5. Kabupaten Barito Utara 6. Kabupaten Murung Raya 7. Kabupaten Gunung Mas 8. Kota Palangkaraya	Kuala Kapuas (PL)	1. Bahaur (PL) 2. Cilik Riwit (PU) 3. Pulang Pisau (PL)
80.	KPPBC Banjarmasin	Madya Pabean B	Kota Banjarmasin	1. Kota Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala 3. Kabupaten Tapin	Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru	1. Samsudin Noor (PU) 2. Warukin (PU) 3. Banjarmasin (PL) 4. Jorong (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Tabalong 8. Kabupaten Balangan 9. Kabupaten Banjar 10. Kota Banjarbaru 11. Kabupaten Tanah Laut	5. Asam-asam/Kintap (PL) 6. Terminal Apung IMPT	
81.	KPPBC Kotabaru	Madya Pabean C	Kabupaten Kotabaru	1. Kabupaten Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu	Satui (PL)	
	KANTOR WILAYAH DJBC					

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
82.	KALIMANTAN BAGIAN TIMUR Balikpapan	Madya Pabean B	Kota Balikpapan	1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kabupaten Paser 4. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja	1. Tanah Grogot (PL) 2. Senipah (PL) 3. Kantor Pos Lalu Bea Balikpapan	1. Sultan Aji Muhammad Sulaiman (PU) 2. Semayang (PL) 3. Terminal Peti Kemas Kariangau (PL) 4. Balikpapan Coal Terminal (PLK) 5. Terminal Lawe-Lawe (PLK) 6. Kampung Baru (PLK) 7. Petrosca Offshore Supply Base (PLK) 8. Penajam Banua Taka (PLK)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
83.	KPPBC Samarinda	Madya Pabean B	Kota Samarinda	1. Kota Samarinda 2. Kabupaten Kutai Kartanegara kecuali Kecamatan Samboja 3. Kabupaten Kutai Barat 4. Kabupaten Mahakam Ulu	Tanjung Santian	9. Intipratama (PLK) 10. Dermaga Kencana Indonesia (PLK) 11. Kutai Chip Mill (PLK) 12. Semipah (PLK) 13. Teluk Waru 14. Teluk Adang  1. Handil (PL) 2. Muara Sanga-sanga (PL) 3. Muara Badak (PL) 4. Tenggarong (PL) 5. Temindung (PU) 6. Samarinda (PL) 7. Palaran (PL) 8. Sungai Siring (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
84.	KPPBC Bontang	Madya Pabean C	Kota Bontang	Kota Bontang			9. Tanjung Batu (PL) 1. Lhoktuan (PL) 2. Bontang (PL) 3. Nyerangkat Sekaming (PL)
85.	KPPBC Sangatta	Madya Pabean C	Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur			1. Sangkuriang (PL) 2. Tanjung Bara Sangatta (PL) 3. Sangatta Lama (PL) 4. Sangatta Baru (PL) 5. Maloy Batuta Trans Kaimantan (PL)
86.	KPPBC Tarakan	Madya Pabean B	Kota Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Bulungan 3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Tana Tidung	1. Bunyu (PL) 2. Tanjung Redep		1. Bunyu (PL) 2. Tanjung Selor (PL) 3. Juwata (PU) 4. Tanjung Redep (PU) 5. Malundung (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
87.	KPPBC Nunukan	Madya Pabean C	Kabupaten Nunukan	5. Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  Kabupaten Nunukan	Sungai Pancang (PL)	6. Long Nawang 7. Malinau  1. Tunontaka (PL) 2. Liem Hie Djung (PL) 3. Sungai Nyamuk (PL) 4. Lalo Salo (PL) 5. Aji Kuning (PL) 6. Long Bawan
88.	KPPBC Makassar	Madya Pabean B	Kota Makassar	1. Kota Makassar 2. Kabupaten Maros 3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1. Bantaeng/Pulau Selayar (PL) 2. Biringkassi (PL)	1. Bantaeng (PL) 2. Bulukumba (PL) 3. Paotere (PL) 4. Sukarno I (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
				4. Kabupaten Gowa 5. Kabupaten Takalar 6. Kabupaten Jeneponto 7. Kabupaten Bantaeng 8. Kabupaten Bulukumba 9. Kabupaten Kepulauan Selayar 10. Kabupaten Bone 11. Kabupaten Sinjai	3. Kantor Pos Latu Bea Makassar 4. Bajoe	5. Sukarno II (PL) 6. Hatta I (PL) 7. Hatta II (PL) 8. Hasannudin (PU) 9. Bajoe (PL) 10. Arasoe 11. Sinjai 12. Uloe (PL) 13. Pattiro	
89.	KPPBC Parepare	Madya Pabean C	Kota Parepare	1. Kota Parepare 2. Kabupaten Barru 3. Kabupaten Pinrang 4. Kabupaten Enrekang 5. Kabupaten Sidenreng Rappang 6. Kabupaten Wajo 7. Kabupaten Soppeng	Mamuju	1. Watansoppeng 2. Mamuju (PL) 3. Barru (PL) 4. Parepare 5. Siwa (PL)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				8. Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat 9. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat 10. Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat 11. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 12. Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat		
90.	KPPBC Malili	Madya Pabean C	Kabupaten Luwu Timur	1. Kabupaten Luwu Timur 2. Kabupaten Luwu Utara 3. Kota Palopo 4. Kabupaten Luwu 5. Kabupaten Tana Toraja	Palopo	1. Balantang (PL) 2. Soroako (PU) 3. Mangkasa Point



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
91.	KPPBC Kendari	Madya Pabean C	Kota Kendari	6. Kabupaten Toraja Utara  1. Kota Kendari 2. Kabupaten Konawe Utara 3. Kabupaten Konawe 4. Kabupaten Konawe Kepulauan 5. Kabupaten Konawe Selatan 6. Kabupaten Muna 7. Kabupaten Muna Barat 8. Kabupaten Buton Utara 9. Kabupaten Buton Tengah 10. Kabupaten Buton 11. Kabupaten Buton Selatan 12. Kota Baubau 13. Kabupaten Wakatobi	1. Baubau (PL) 2. Pomalaa	1. Wawoni (PL) 2. Lasolo (PL) 3. Wanci (PL) 4. Raha (PL) 5. Sikeli (PL) 6. Banabumi (PL) 7. Wolter Mongonsidi (PU) 8. Kendari (PL) 9. Ereke (PL) 10. Kolaka (PL) 11. Pomalaa (PL) 12. Boepinang

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				14. Kabupaten Kolaka 15. Kabupaten Kolaka Timur 16. Kabupaten Kolaka Utara 17. Kabupaten Bombana		
	KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA					
92.	KPPBC Pantoloan	Madya Pabeaan C	Kota Palu	1. Kota Palu 2. Kabupaten Donggala 3. Kabupaten Parigi Moutong 4. Kabupaten Tolitoli 5. Kabupaten Buol 6. Kabupaten Sigi 7. Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat	Tolitoli (PL)	1. Sabang (PL) 2. Parigi (PL) 3. Ogotua (PL) 4. Leok 5. Pantoloan (PL) 6. Pasang Kayu (PL) 7. Donggala

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
93.	KPPBC Morowali	Madya Pabean C	Kabupaten Morowali	1. Kabupaten Morowali 2. Kabupaten Morowali Utara 3. Kabupaten Poso		1. Kasiguncu (PU) 2. Moahino/Bohumbeli (PL) 3. Poso (PL) 4. Kolonedale (PL)
94.	KPPBC Luwuk	Madya Pabean C	Kabupaten Banggai	1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Banggai Laut 4. Kabupaten Tojo Una-una		1. Pagimana (PL) 2. Banggai (PL) 3. Toili (PL) 4. Bunta (PL) 5. Bubung (PU) 6. Luwuk (PL) 7. Wakai 8. Batui 9. Ampana (PL)
95.	KPPBC Bitung	Madya Pabean C	Kota Bitung	1. Kota Bitung 2. Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan		1. Kema (PL) 2. Belang (PL) 3. Kotabunan (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				LIKUPANG Barat, KecamatanLIKUPANG Selatan, Kecamatan LIKUPANG Timur, KecamatanDimembe, KecamatanAirmadidi, KecamatanKauditan dan KecamatanKema 3. KabupatenMinahasa pada KecamatanKombi, KecamatanLembean Timur, KecamatanKakas, KecamatanKakas Barat, KecamatanRemboken, KecamatanLangowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan,		4.LIKUPANG (PL) 5. BITUNG (PL) 6. RATATOTOK

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan Kecamatan Eris 4. Kabupaten Minahasa Tenggara 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 6. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
96.	KPPBC Manado	Maçya Pabean C	Kota Manado	1. Kota Manado 2. Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan	1. Labuhan Uki (PL) 2. Tahuna (PL) 3. Hulu Siau (PL)	1. Inobonto (PL) 2. Tagulandang (PL) 3. Manado (PL) 4. Sam Ratulangi (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Wori, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Kalawat 3. Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Tombariri, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu, Kecamatan Sonder, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Kawangkoan Utara 4. Kota Tomohon 5. Kota Kotamobagu	4. Marore (PL) 5. Miangas (PL) 6. Amurang (PL) 7. Lirung (PL) 8. Kantor Pos Lalu Bea Manado	5. Molibagu (PL) 6. Petta (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Bolaang Mongondow 7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 9. Kabupaten Kepulauan Sangihe 10. Kabupaten Kepulauan Talaud 11. Kabupaten Minahasa Selatan		
97.	KPPBC Gorontalo	Madya Pabean C	Kota Gorontalo	1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Bone Bolango 3. Kabupaten Gorontalo 4. Kabupaten Gorontalo Utara		1. Kwandang (PL) 2. Paguat (PL) 3. Popayato (PL) 4. Jalaluddin (PU) 5. Gorontalo (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5. Kabupaten Boalemo 6. Kabupaten Pohuwato		6. Angrek (PL)
	KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU					
98.	KPPBC Ambon	Madya Pabean C	Kota Ambon	1. Kota Ambon 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Buru 4. Kabupaten Buru Selatan 5. Kabupaten Seram Bagian Timur 6. Kabupaten Seram Bagian Barat	1. Pattimura (PU) 2. Kantor Pos Lalu Bea Ambon	1. Banda (PL) 2. Namlea (PL) 3. Geser (PL) 4. Wainibe/Pulau Buru (PL) 5. Tulehu (PL) 6. Opin./Pasahari (PL) 7. Ambon (PL)
99.	KPPBC Tual	Madya Pabean C	Kota Tual	1. Kota Tual 2. Kabupaten Kepulauan Aru 3. Kabupaten Maluku Tenggara	Dobo	1. Benjina/Pulau Kei (PL) 2. Saumlaki (PL) 3. Ngadi



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 5. Kabupaten Maluku Barat Daya kecuali Pulau Wetar		4. Elat 5. Larat 6. Wonreli/Kisar 7. D. Dumatubun Langgur (PU) 8. Serwaru 9. Karel Satsuit Tubun (PU) 10. Tual (PL)
100	KPPBC Ternate	Madya Pabean C	Kota Ternate	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore Kepulauan 3. Kabupaten Halmahera Barat 4. Kabupaten Halmahera Utara 5. Kabupaten Pulau Morotai	1. Pulau Gebe (PL) 2. Galcia/Tobelo (PL) 3. Pulau Mangole (PL) 4. Kantor Pos Lalu Bea Ternate	1. Labuha (PL) 2. Babullah (PU) 3. Bastiong (PL) 4. Tanjung Barnabas (PL) 5. Ternate (PL) 6. Sanana (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Halmahera Timur 7. Kabupaten Halmahera Tengah 8. Kabupaten Halmahera Selatan 9. Kabupaten Kepulauan Sula 10. Kabupaten Pulau Taliabu		
	KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA					
101	KPPBC Sorong Madya Pabean C	Kota Sorong		1. Kota Sorong 2. Kabupaten Sorong 3. Kabupaten Sorong Selatan 4. Kabupaten Raja Ampat 5. Kabupaten Maybrat	1. Teluk Kasim (PL) 2. Kantor Pos Lelu Bea Sorong	1. Domine Edward Osok (DEO) Sorong (PU) 2. Arar (PL) 3. Sorong (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Tambrauw		4. Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL) 5. Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL) 6. Pelabuhan Waisai (PL)
102	KPPBC Manokwari	Madya Pabean C	Kabupaten Manokwari	1. Kabupaten Manokwari 2. Kabupaten Manokwari Selatan 3. Kabupaten Teluk Wondama 4. Kabupaten Pegunungan Arfak		1. Rendani (PU) 2. Manokwari (PL)
103	KPPBC Fakfak	Madya Pabean C	Kabupaten Fakfak	1. Kabupaten Teluk Bintuni 2. Kabupaten Fakfak 3. Kabupaten Kaimana	1. Teluk Bintuni 2. Kaimana	1. Bintuni (PL) 2. LNG Tangguh 3. Wimro

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
104	KPPBC Jayapura	Madya Pabean C	Kota Jayapura	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Jayawijaya 4. Kabupaten Sarmi 5. Kabupaten Pegunungan Bintang	1. Sentani (PU) 2. Skouw (LBD) 3. Kantor Pos Lelu Bea Jayapura 4. Hamadi (PL)	4. Kokas (PL) 5. Fakfak (PU) 6. Fakfak (PL) 7. Pulau Adi (PL) 8. Teluk Etna 9. Kaimana (PL) 10. Utarom Kaimana (PU) 11. Lobo (PL) 12. Pelabuhan Khusus Arawala (PL)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				6. Kabupaten Keerom 7. Kabupaten Mamberamo Raya 8. Kabupaten Mamberamo Tengah 9. Kabupaten Nduga 10. Kabupaten Lanny Jaya 11. Kabupaten Tolikara 12. Kabupaten Yahukimo 13. Kabupaten Yalimo	7. Wamena 8. Jayapura (PL) 9. Batom 10. Arso Timur	
105	KPPBC Timika	Madya Pabean C	Kabupaten Mimika	1. Kabupaten Mimika 2. Kabupaten Deiyai	1. Amamapare (PL) 2. Kuala Kencana/Kota Baru 3. Pomako I	1. Corgodock 2. Tembagapura 3. Timika (PU)

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja			Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		
106	KPPBC Biak	Madya Pabean C	Kabupaten Biak Numfor	1. Kabupaten Biak Numfor 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Waropen 4. Kabupaten Supiori 5. Kabupaten Nabire 6. Kabupaten Paniai 7. Kabupaten Intan Jaya 8. Kabupaten Dogiyai 9. Kabupaten Puncak 10. Kabupaten Puncak Jaya	1. Kantor Pos Lalu Bea Biak 2. Nabire	1. Serui (PL) 2. Dawai (PL) 3. Biak (PL) 4. Waren 5. Frans Kaisiepo (PU) 6. Enarotali	
107	KPPBC Merauke	Madya Pabean C	Kabupaten Merauke	1. Kabupaten Merauke 2. Kabupaten Boven Digul 3. Kabupaten Asmat 4. Kabupaten Mappi	1. Sota (LBD) 2. Yetetkeun	1. Asiki 2. Bupul (LBD) 3. Mindiptana (LBD) 4. Agats (PL) 5. Bade (PL) 6. Mopah (PU)	

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
					7. Merauke (PL) 8. Wanam (PL)	
	3 KPU 104 KPPBC			161 KANTOR BANTU	648 POS PENGAWASAN	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAMATI

No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
						7. Merauke (PL) 8. Wanam (PL)
	3 KPU 104 KPPBC				161 KANTOR BANTU	648 POS PENGAWASAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



↳ SRI MULYANI INDRAMATI



No.	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	Wilayah Kerja		
				Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
					7. Merauke (PL) 8. Wanam (PL)	
	3 KPU 104 KPPBC			161 KANTOR BANTU	648 POS PENGAWASAN	

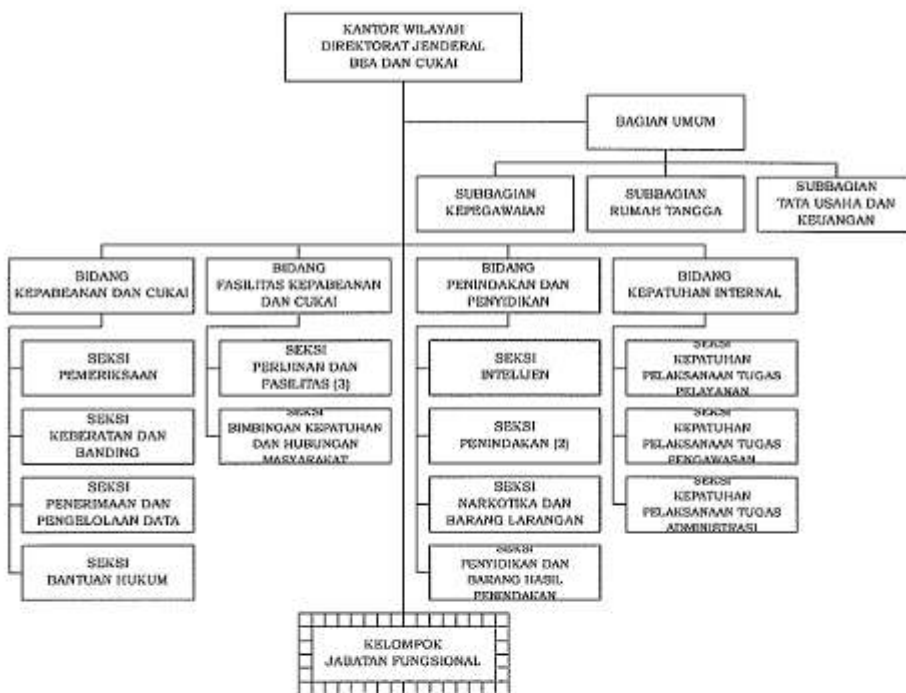
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  
SRI MULYANI INDRAMATI

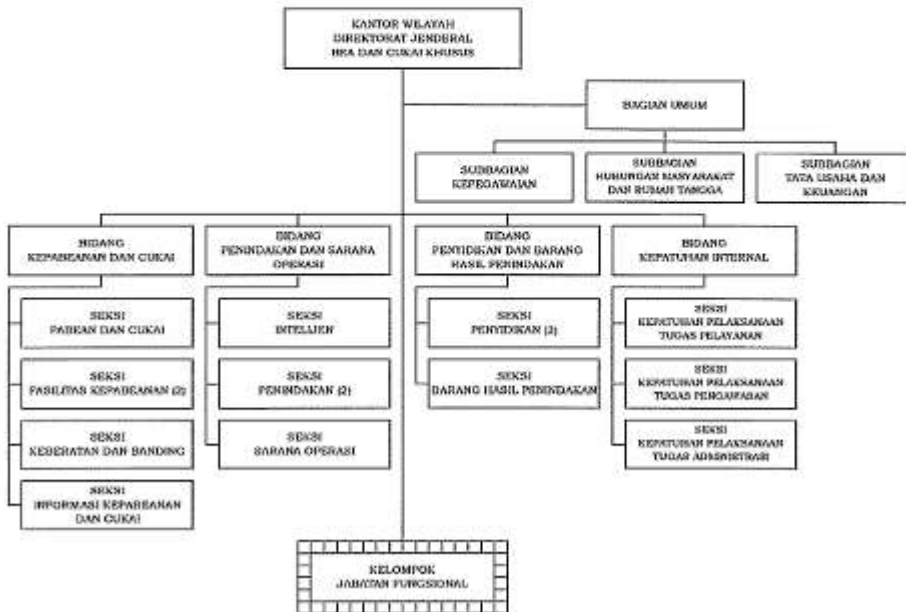
- 102 -

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL  
 BEA DAN CUKAI

BAGAN ORGANISASI  
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

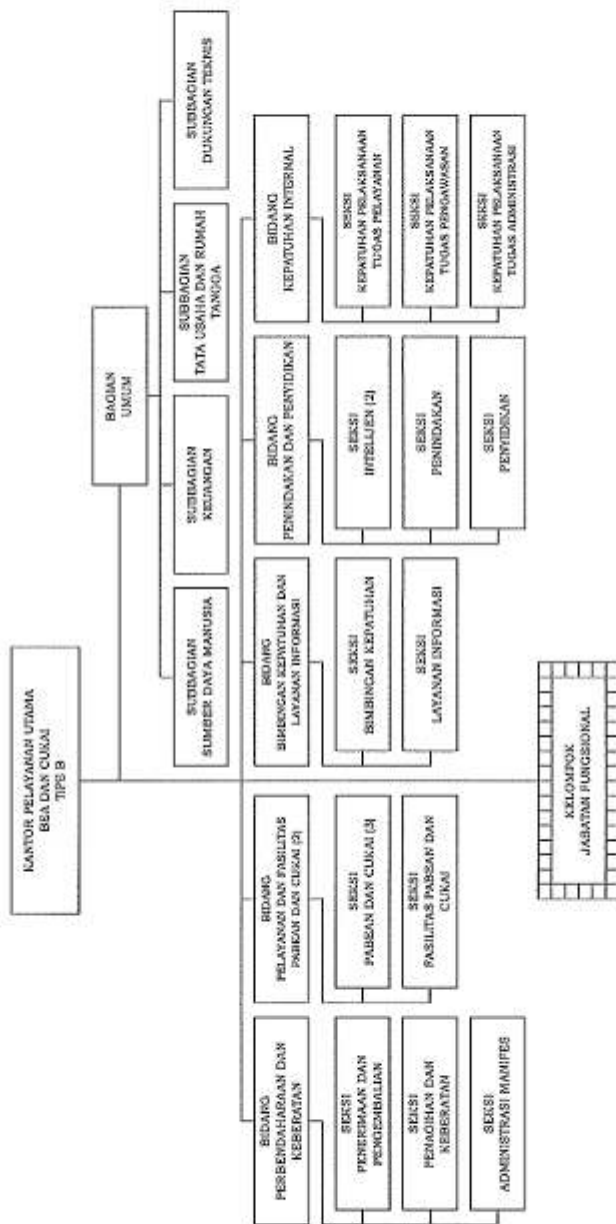


BAGAN ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS

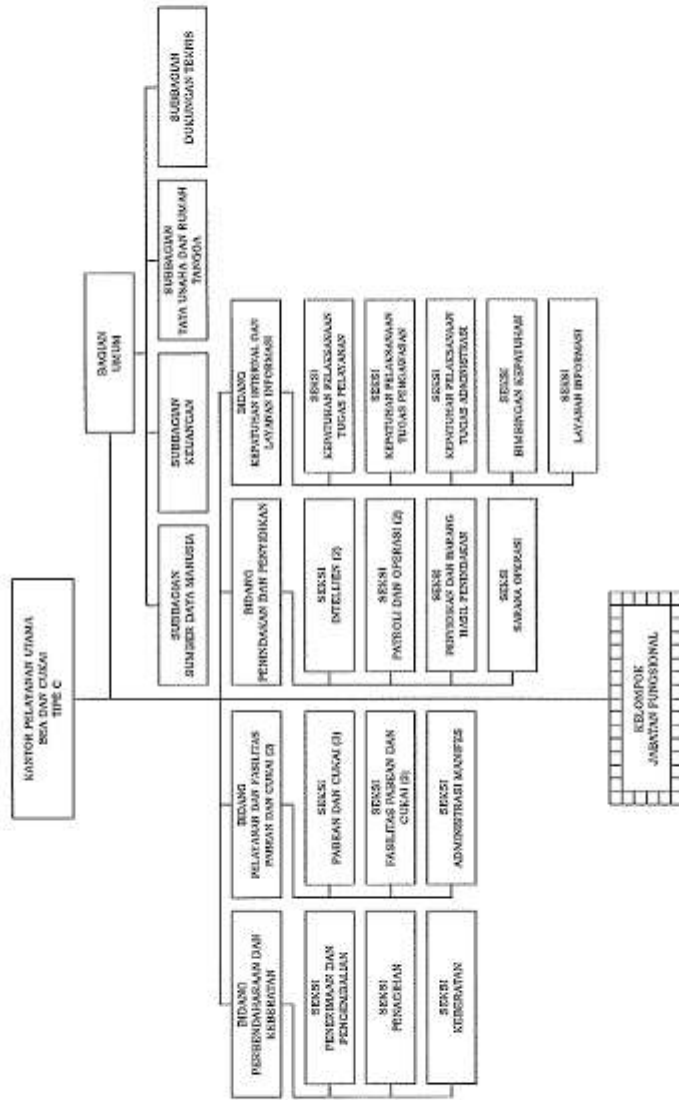




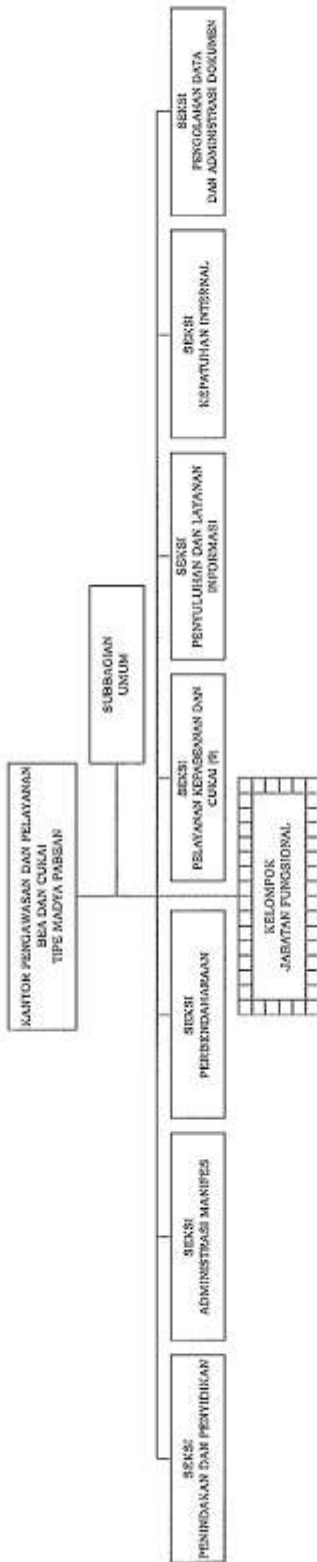
**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI**  
**TIPE B**



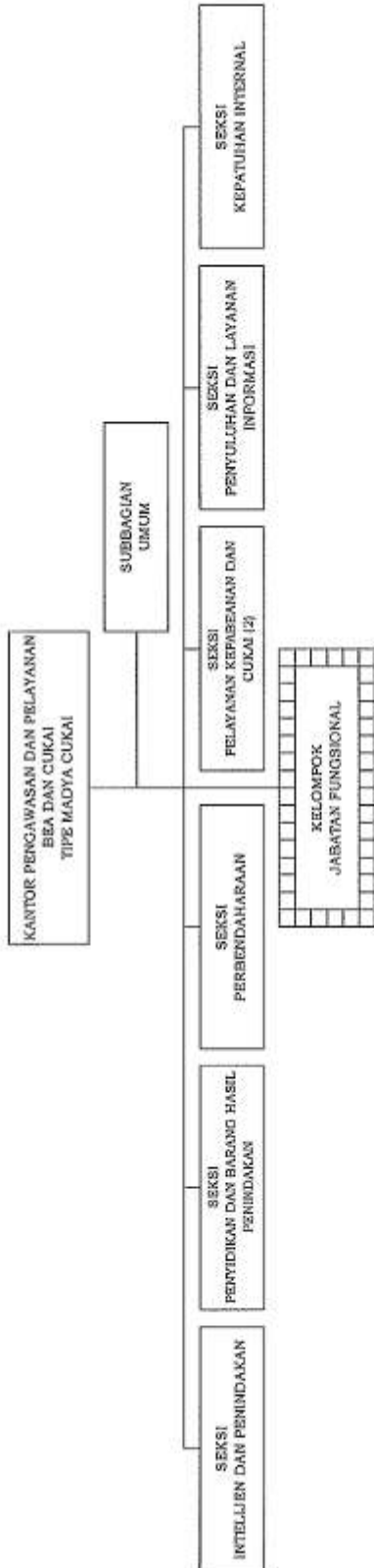
**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI  
TIPE C**



**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE MADYA PABEAN**

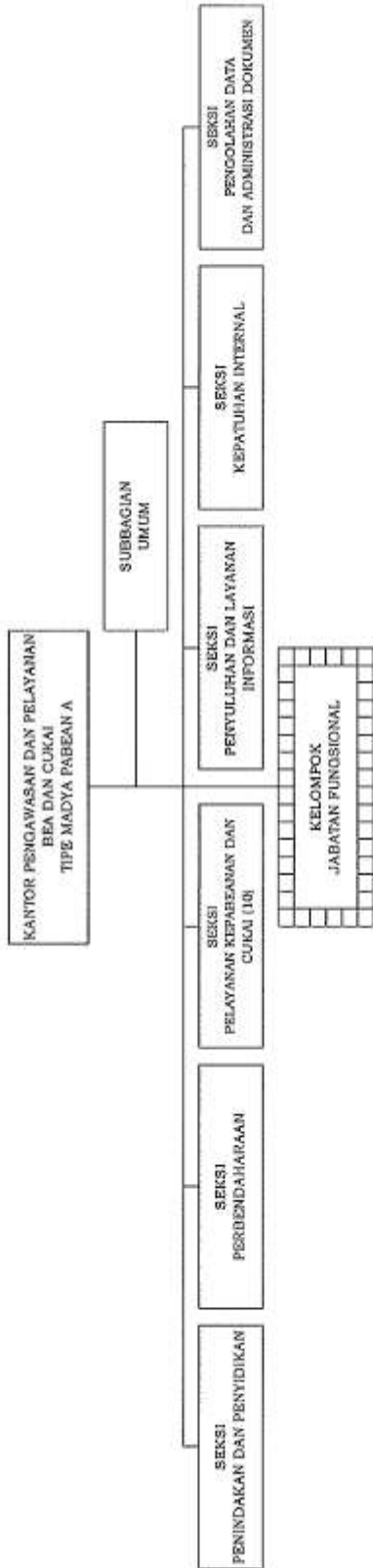


BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA CUKAI





BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN A



BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B

